

2010

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DETI MULYATI,SH.MH.CN DAN Dr PRIO TEGUH,SH.MSi

[GBPP DAN SAP “HUKUM TATA PEMERINTAHAN”]

[Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the document.]

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN (GBPP)

MATA KULIAH : HUKUM TATA PEMERINTAHAN

NOMR KODE/ SKS :...../2

DESKRIPSI SINGKAT : Mata kuliah ini membahas tentang hukum tata pemerintahan dalam kerangka hokum seluruhnya; Sumber-sumber Hokum Tata Pemerintahan; Sifat-sifat pemerintah dan pemerintahan, Peradilan Tata Usaha Negara ,Hukum Pemerintahan Daerah

STANDAR KOMPETENSI : Setelah mengikuti mata kuliah ini praja diharapkan mampu menjelaskan kedudukan Hukum Pemerintahan dalam kerangka hokum seluruhnya;menyebutkan sumber sumber Hukum Tata Pemerintahan , Asas-asas pemerintahan , Keputusan Administrasi Negara; dan Hukum Pemerintahan Daerah.

NO	KOMPETENSI DASAR	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	WAKTU	KBM	MEDIA	SUMBER PUSTAKA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<ol style="list-style-type: none"> Praja dapat memahami dan menjelaskan mengenai Latar belakang dan tujuan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara); Praja diharapkan, mampu menjelaskan Pengertian, subjek, objek, terminonologi, & sumber Hukum Tata Pemerintahan (Hyukum Administrasi Negara) 	Istilah,dan pengertian,Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara)	<ol style="list-style-type: none"> Pengantar, latar belakang dan tujuan Hukum Tata Pemerintahan ; Istilah Hukum tata Pemerintahan; Pengertian, subjek, objek, terminonologi, & sumber Hukum Tata Pemerintahan 	100 “	<ol style="list-style-type: none"> Pendahuluan; Penyajian (pemaparan dan diskusi); Penutup 	White Board, Spidol, LCD & Laptop	<ol style="list-style-type: none"> Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. Hajon, Philipus M, et.all., Pengantar HAN. Gajah Mada University Press, 1995. Nugraha, Safri, dkk. Hukum Administrasi Negara. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005.

							<p>4. Purbopranoto, Kuntjoro. Perkembangan HAN Indonesia. Jakarta: BPHN-Binacipta, 1981.</p> <p>5. ----- . Beberapa Catatan Hukum tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: lumni, 1985.</p> <p>6. Prins, W.F terjemahan R Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.</p> <p>7. Simatupang, Dian PN. Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.</p>
2	Praja dapat memahami pengertian dasar dan dasar-dasar umum dari Hukum Tata Pemerintahan	Pengertian-pengertian Dasar Hukum Tata Pemerintahan	<p>1. Pengertian Dasar;</p> <p>2. Dasar Umum dari Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara)</p>	sda	sda	sda	Prof.Dr.Mr.S.Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, 1994
3	Praja dapat memahami bidang yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan	lingkup dan letak Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara) dalam sistematika ilmu	<p>1. Landasan ;</p> <p>2. Hubungan Hukum Tata Pemerintahan /HAN dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya,</p>	sda	sda	sda	sda

		hukum	3. Hukum Tata Pemerintahan/ HAN otonom-heteronom				
4	Praja dapat memahami konsep Negara hukum	Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara	1. Negara Hukum; 2. Negara Hukum Demokratis 3. Tugas pemerintah Dalam Negara Hukum;	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 Sda Pertemuan 1
5	Praja dapat menjelaskan dan menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	1. Istilah;Pengertian dan Kedudukan 2. Fungsi AAUPL; 3. Pembagian dan Macam-macam AAUPL	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 200
6	Praja dapat memahami dan menjelaskan Perbuatan/Tindakan Administrasi Negara (TAN) dan permasalahannya.	Tindakan Hukum Pemerintah dan Kewenangan pemerintah	1. Pengertian Tindakan Pemerintahan 2. Unsur,macam dan karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan Keputusan Administrasi Negara ; 3. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan; 4. Sumber dan Cara memperoleh wewenang pemerintahan	sda	sda	sda	sda
7	Praja dapat memahami pengertian per-uu-an dan kewenangan legislasi	. Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Tata Usaha Negara	1. Istilah ;pengertian dan ciri-ciri per-uu-an; 2. Pengertian dan unsur ketetapan	sda	sda	sda	
8	UTS						
9	Praja dapat memahami konsep freies ermesen dan penormaan peraturan kebijakan	Peraturan Kebijaksanaan	1. Freies Ermessen; 2. Pengertian;cirri,fungsi dan Penormaan Peraturan	sda	sda	sad	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada

			Kebijaksanaan				Jakarta 200
10	Praja dapat memahami pembagian kekuasaan DPRD dengan Kepala Daerah	Hukum Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sejarah 2. Jenis Pembagian Kekuasaan dan ; 3. paradigma checks and balances dalam hubungan legislative dan eksekutif 	sda	sda	sda	Dr.Juanda ,SH.MH,Hukum Pemerintahan Daerah ,Pasang surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,PT Alumni Bandung 2004
11	Praja dapat memahami hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah	Hukum Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makna dan jenis Hubungan kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah; 2. Pendekatan yuridis Konstitusional dan Pendekatan non Yuridis ; 3. Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Berdasarkan Peraturan perundang-undangan 	sda	sda	sda	sda
12	Praja mengetahui dan memahami kedudukan dan macam jabatan pemerintahan serta kedudukannya dalam hokum privat	Kedudukan Hukum Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik; 2. Macam-macam jabatan pemerintahan; 3. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Privat 	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 200
13	Praja memahami perlindungan dan penegakan dalam hokum tata pemerintahan	Perlindungan ; Penegakan dan Pertanggungjawaban Hukum Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hokum dalam bidang perdata dan bidang public; 2. Penegakan Hukum dalam Hukum Tata pemerintahan; 3. Macam-macam sanksi dalam Hukum Tata Pemerintahan 	sda	sad	sda	sda
14	Praja memahami proses peradilan administrasi negara	Peradilan Tata Usaha Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian; 2. Sistem Peradilan 				

			Administrasi Negara pada umumnya	sda	sda	sda	sda
15	sda	Peradilan Tata Usaha Negara	Kompetensi Peradilan Administrasi Negara	sda	sda	sda	sda
16	UAS						

DAFTAR PUSTAKA :

1. Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. ;
2. Dr.Juanda ,SH.MH,Hukum Pemerintahan Daerah ,Pasang surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,PT Alumni Bandung 2004
3. Hajon, Philipus M, et.all., Pengantar HAN. Gajah Mada University Press, 1995. ;
4. Nugraha, Safri, dkk. Hukum Administrasi Negara. Depok: Badan Penerbit FHUI, 2005. ;
5. Purbopranoto, Kuntjoro.Perkembangan HAN Indonesia. Jakarta: BPHN- Binacipta, 1981.
6.Beberapa Catatan Hukum tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara.Bandung: lumni, 1985;
7. Prins, W.F terjemahan R Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987. ;
8. Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006;
9. Simatupang, Dian PN.Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis. Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005;

SATUAN ACARA PEMBELAJARAN

MATA KULIAH : HUKUM TATA PEMERINTAHAN

KODE MATA KULIAH :

SEMESTER : V

BEBAN SKS : 2

WAKTU : 100 menit

HARI/TANGGAL :

TAHUN AKADEMIK : 2010 /2011

TTM	TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM	TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS	POKOK BAHASAN	SUB POKOK BAHASAN	KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR		MEDIA	SUMBER	EVALU-ASI
					Kegiatan Dosen	Kegiatan Praja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Praja dapat memahami mengenai Latar belakang dan tujuan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara);	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praja dapat memahami dan menjelaskan mengenai Latar belakang dan tujuan Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara); 2. Praja diharapkan, mampu menjelaskan Pengertian, subjek, objek, terminologi, & sumber Hukum Tata 	Istilah,dan pengertian,Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar, latar belakang dan tujuan Hukum Tata Pemerintahan ; 2. Istilah Hukum tata Pemerintahan; 3. Pengertian, subjek, objek, terminologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjelaskan materi yang akan diberikan 	Memperhatikan, tanya jawab Dan mencatat	White Board, Spidol, LCD & Laptop	<ol style="list-style-type: none"> 1. Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. 2. Hajon, Philipus M, et.all., Pengantar HAN. Gajah Mada University Press, 1995. 3. Nugraha, Safri, dkk. Hukum Administrasi Negara. Depok: 	

		<p>Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara</p>		<p>gi, & sumber Hukum Tata Pemerintahan</p>				<p>Badan Penerbit FHUI, 2005.</p> <p>4. Purbopranoto, Kuntjoro. Perkembangan HAN Indonesia. Jakarta: BPHN-Binacipta, 1981.</p> <p>5. -----, Beberapa Catatan Hukum tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Bandung: lumni, 1985.</p> <p>6. Prins, W.F terjemahan R Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.</p> <p>7. Simatupang, Dian PN. Determinasi Kebijakan Anggaran Negara Indonesia, Studi Yuridis. Jakarta: Papas Sinar</p>	
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

								Sinanti, 2005.	
2	Praja dapat memahami pengertian dasardan dasar-dasar umum dari Hukum Tata Pemerintahan	Praja dapat menjelaskan dasar-dasar umum dari Hukum Tata Pemerintahan	Pengertian-pengertian Dasar Hukum Tata Pemerintahan	1. Pengertian Dasar; 2. Dasar Umum dari Hukum Administrasi Negara	sda	sda	sda	Prof.Dr.Mr.S.Prayu diAtmosudirjo, Hukum Administrasi Negara,Ghalia Indonesia ,1994	
3	Praja dapat memahami bidang yang menjadi kajian Hukum Tata Pemerintahan	Praja dapat menjelaskan objek dari hokum tata pmerintahan	lingkup dan letak Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi Negara) dalam sistematika ilmu hukum	1. Landasan ; 2. Hubungan hukum tata Pemerintahan /HAN dengan cabang-cabang ilmu hukum lainnya, 3. Hukum Tata Pemerintahan/ HAN otonom-heteronom	sda	sda	sda	sda	
4	Praja dapat memahami konsep Negara hukum	Praja dapat menjelaskan pengertian dan penerapan Negara hukum	Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara	1. Negara Hukum; 2. Negara Hukum Demokratis 3. Tugas pemerintah Dalam Negara Hukum;	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 Sda Pertemuan 1	

5	Praja dapat memahami asas-asas umum pemerintahan yang baik	Praja dapat menjelaskan dan menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik	Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istilah; Pengertian dan Kedudukan 2. Fungsi AAUPL; 3. Pembagian dan Macam-macam AAUPL 	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 Sda Pertemuan 1	
6	Praja dapat memahami Perbuatan/Tindakan Administrasi Negara (TAN) dan permasalahannya.	Praja dapat menjelaskan Perbuatan/Tindakan Administrasi Negara (TAN) dan permasalahannya.	Tindakan Hukum Pemerintah dan Kewenangan pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Tindakan Pemerintahan 2. Unsur,macam dan karakteristik Tindakan Hukum Pemerintahan Keputusan Administrasi Negara ; 3. Asas Legalitas dan Wewenang Pemerintahan; 4. Sumber dan Cara memperoleh 	sda	sda	sda	sda	

				wewenang pemerintah an					
7	Praja dapat memahami pengertian per-uu-an dan kewenangan legislasi	Praja dapat menjelaskan pengertian per-uu-an dan kewenangan legislasi	Peraturan Perundang-undangan dan Ketetapan Tata Usaha Negara	1. Istilah; pengertian dan ciri-ciri per-uu-an;; 2. Pengertian dan unsur ketetapan	sda	sda	sda	sda	
8	UTS								
9	Praja dapat memahami konsep freies ermessen dan penormaan peraturan kebijakan	Praja dapat menjelaskan pengertian freies ermessen dan penormaan peraturan kebijakan	Peraturan Kebijakan	1. Freies Ermessen; 2. Pengertian; cirri, fungsi dan Penormaan Peraturan Kebijakan	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 Sda Pertemuan 1	
10	Praja dapat memahami pembagian kekuasaan dan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah	Praja dapat menjelaskan dan menyebutkan pembagian kekuasaan dan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah	Hukum Pemerintahan Daerah	1. Sejarah 2. Jenis Pembagian Kekuasaan dan ; 3. paradigma checks and balances dalam hubungan legislative dan eksekutif	sda	sda	sda	Dr.Juanda ,SH.MH,Hukum Pemerintahan Daerah ,Pasang surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,PT Alumni Bandung 2004	

11	Praja dapat memahami hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah	Praja dapat menjelaskan dan menyebutkan hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah	Hukum Pemerintahan Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makna dan jenis Hubungan kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah; 2. Pendekatan yuridis Konstitusional dan Pendekatan non Yuridis ; 3. Pelaksanaan Hubungan Kewenangan Berdasarkan Peraturan perundang-undangan 	sda	sda	sda	Dr.Juanda, SH.MH,Hukum Pemerintahan Daerah ,Pasang surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah,PT Alumni Bandung 2004	
----	---	--	---------------------------	---	-----	-----	-----	---	--

12	Praja dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan macam jabatan pemerintahan serta kedudukannya dalam hokum privat	Praja dapat menjelaskan kedudukan dan menyebutkan macam jabatan pemerintahan serta kedudukannya dalam hokum privat	Kedudukan Hukum Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedudukan Pemerintah dalam Hukum Publik; 2. Macam-macam jabatan pemerintahan; 3. Kedudukan Pemerintah Dalam Hukum Privat 	sda	sda	sda	Ridwan,HR. Hukum Administrasi Negara.PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006 Sda Pertemuan 1	
13	Praja dapat memahami perlindungan dan penegakan dalam hokum tata pemerintahan	Praja dapat menjelaskan perlindungan dan penegakan dalam hokum tata pemerintahan	Perlindungan ; Penegakan dan Pertanggungja waban Hukum Administrasi Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan hokum dalam bidang perdata dan bidang public; 2. Penegakan Hukum dalam Hukum Tata pemerintahan; 3. Macam-macam sanksi dalam Hukum Tata Pemerintahan 	sda	sad	sda	sda	

14	Praja dapat memahami proses peradilan administrasi negara	Praja dapat menjelaskan proses peradilan administrasi negara	Peradilan Tata Usaha Negara	1. Pengertian; 2. Sistem Peradilan Administrasi Negara pada umumnya					
15	Praja dapat memahami proses peradilan administrasi negara	Praja dapat menjelaskan proses peradilan administrasi negara	Peradilan Tata Usaha Negara	Kompetensi Peradilan Administrasi Negara					
16	UAS								

Sistem Evaluasi

Instrumen yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari:

1. Kehadiran minimal 80 % ;
2. tatap muka : 10 % ;
3. Tugas : 20 % ;
4. UTS : 30 % ;
5. UAS : 40 %

Nilai akhir mahasiswa bergantung pada hasil total evaluasi tersebut di atas. Tidak ada tugas lain untuk memperbaiki nilai yang diperoleh dari total evaluasi dan tidak ada tugas, tes, maupun ujian susulan.

Untuk Memperoleh Nilai "C":

1. Memperoleh nilai total minimal 56 (lima puluh enam) pada skala 100 (seratus).
2. Memperoleh nilai rata-rata minimal "C" untuk tugas, tes 1, tes 2, UTS, dan Tugas Akhir Semester.

Untuk Memperoleh Nilai "B":

1. Memenuhi kriteria perolehan nilai "C" sebagaimana keterangan di atas.
2. Memperoleh nilai rata-rata minimal "B" untuk tes 1, tes 2, UTS, dan Tugas Akhir Semester.

Untuk Memperoleh Nilai "A":

1. Memenuhi kriteria 1-3 perolehan nilai "B" sebagaimana keterangan di atas.
2. Memperoleh nilai rata-rata minimal "A" untuk tes 1, tes 2, UTS, dan Tugas Akhir Semester.

KEHADIRAN/PARTISIPASI

Mengingat materi perkuliahan yang berkesinambungan dan membutuhkan partisipasi aktif para peserta baik individual maupun kelompok, kehadiran mahasiswa dalam setiap pertemuan sangatlah penting. Nilai 10 (sepuluh) persen untuk partisipasi mahasiswa diberikan sebagai berikut

Jumlah Ketidakhadiran (absen)	Nilai Kehadiran
0 kali	10 %
1 kali	8 %
2 kali	6 %
3 kali	4 %
4 kali	2 %
5 KALI	0 % dan Tidak boleh mengikuti UAS (Laporan Tugas Akhir Semester)

